



RENJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 102 /F-02/ III /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab bertugas :

1. bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja PD Tahun 2021;
2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja PD Tahun 2021; dan
3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

b. Ketua bertugas :

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja PD Tahun 2021;
2. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja PD Tahun 2021;
3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tim penyusun kepada Penanggung jawab; dan
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris bertugas :

1. menyusun dokumen Renja PD Tahun 2021;
2. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
3. merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2021; dan
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

d. Anggota bertugas :

1. mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan;
3. melakukan telaahan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
5. merumuskan tujuan, sasaran program, dan kegiatan Tahun 2021;
6. menyesuaikan dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang telah ditetapkan; dan
7. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 102/F-02/ III /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

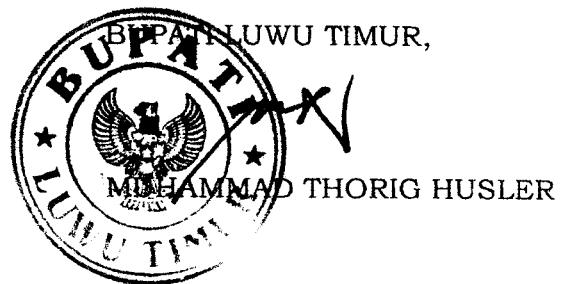
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian

Anggota :

1. Kabid. Penata Desa
2. Kabid. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
3. Kabid. Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi. Penata Desa
5. Kasi. Keuangan dan Asset Desa
6. Kasi. Pengembangan Sumber Daya Alam Pemerintah Desa
7. Kasi. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa
8. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
9. Kasi. Badan Permusyawaratan Desa
10. Kasubag. Umum dan Keuangan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	23
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.....	42
Bab III Tujuan dan Sasaran perangkat daerah	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.....	43
3.3. Program dan Kegiatan	49
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat daerah	66
Bab V Penutup.....	70

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021 ini.

Malili, Juli 2020
KEPALA DINAS,



HALSEN, S.IP, M.M
Pangkat :Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19720424 199203 1 004

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RENJA DPMD Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan OPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka DPMD Kabupaten Luwu Timur melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja)

tahun 2021. Renja DPMD Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DPMD yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur yaitu "Luwu Timur Terkemuka 2021"

Renja DPMD Kabupaten Luwu Timur 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari Renja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan DPMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui Program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e) Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f) Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);

- n) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
- o) Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan di lingkungan DPMD sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Luwu Timur adalah :

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan dokumen perencanaan;
- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPMD Tahun 2020;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tahun 2019 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD DPMD. Pada Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan 12 program dan 50 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.130.841.788,- atau sebesar 88,20 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.215.620.163 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.876.456.050 ,- atau sebesar 97.6 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.923.223.683 - dan belanja langsung sebesar Rp. 6.254.385.738- atau sebesar 85.8 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.292.396.480-. Untuk lebih jelasnya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut : (**Tabel 2.1)**

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(Tahun n-3)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (n-2)			Target Program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD) Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2020		SKPD pelaksana
					Target Renja SKPD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target s/d Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (%)	100								DPMD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	1717	1,391	1,717	1,391	81.0134	1717	4,499	429	

	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	160	36	36	36	36	100	36	108	9	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang terbayarkan (Orang)	7	2	2	2	2	100	2	6	2	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara (unit)	151	34	33	34	34	100	33	101	8	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	42	59	27	59	100	27	145	19		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (jenis)	8	6	6	6	100	6	18	5		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia (jenis)	21	6	8	6	75	58	70	0		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Eksemplar)	280	60	60	60	100	60	180	8		

	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Dos)	1,980	644	946	644	68.07611	946	2,234	232	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	336	136	115	136	100	61	333	13	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis yang Terbayarkan (Orang)	61	14	14	14	100	18	46	18	
	Penyediaan Penunjang administrasi kesekretariatan	Jumlah Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (jenis)	21				-		-		
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Disusun (Dokumen)	24	4	6	4	66.667	4	12	1	
	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang Dilaksanakan (kali)	1368	162	240	162	67.5	240	564	60	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi (%)	100				-		-		DPMD

Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (Unit)	1								-			-		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)	5								-			-		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (Paket)	1								-	26	26	26	0	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan (jenis)	72	7	10	7					70			14		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	1	1	1					100	1		3	0	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	63	8	15	8					53.33333	0		16	8	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan dan Hari-hari Tertentu (%)	100								-			-		DPMD

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (Dokumen)	16	4	4	4	100	5	13	1	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan kelompok masyarakat yang diberdayakan (%)	100				-		-		DPMD
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa (Lembaga)	11				-	248	248	0	
Bimbingan Manajemen Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu	Jumlah posyandu yang mengikuti bimbingan manajemen (Posyandu)	264	11	11	11	100	139	161	20	
Sosialisasi tentang Pemahaman Program Teknologi Tepat Guna	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (Kali)	11				-		-		
Lomba Inovasi Teknologi tepat Guna	Jumlah kelompok teknologi tepat guna yang mengikuti lomba (Kelompok)	23	9	9	9	100	11	29	0	
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Nasional yang diikuti (Kali)	2	1	1	1	100	1	3	0	

Fasilitasi pemberian bantuan modal Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDesa sehat yang diberikan bantuan modal (BUMDesa)	9							-			-		
Pendampingan Teknis dan Akses Pemasaran BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang mendapatkan pendampingan teknis dan akses pemasaran BUMDesa (BUMDesa)	248							-	124	124	0		
Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Tingkat Nasional	Jumlah Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang diikuti (Kali)	1	0	0	0	0	0	-		1		0		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa (%)	100							-					
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RPJMDesa (Desa)	11	0	0	0	0	0	-						
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penguatan Kelembagaan Lokal	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Desa)	10							-					
Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam membangun desa (Lembaga)	124	124	124	124	124	124	100		124	372	0		

Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas (Orang)	372	124	124	124	100	250	498	0	
Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan (Kali)	2	1	2	1	50	2	4	0	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100				-		-		
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan (Orang)	248				-		-		
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan dalam bidang perencanaan (Orang)	124				-	124	124	0	
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan dalam manajemen pemerintahan desa (Orang)	372	124	124	124	100	45	293	45	
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang terpilih (Orang)	65	45	46	45	97.82609		90		

	Facilitasi Seleksi Perangkat Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Seleksi Perangkat Desa (Desa)	55	15	15	15	100	15	45	2	
	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan (Kali)	12	4	4	4	100	124	132	31	
	Facilitasi penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terkait RKP Desa (Kali)	11	124	124	124	100	124	372	0	
	Sosialisasi penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa (LKPPD dan LKPJ Desa)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terkait LKPPD dan LKPJ Desa (Kali)	11	124	124	124	100	124	372	0	
	Facilitasi Penyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa yang Menyusun RPJM Desa Tepat Waktu (Desa)	66				-	46	46	0	
	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Keikut Sertaan Perempuan Dalam Pembangunan (%)	90				-		-		
	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Meningkatnya pemahaman Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sehat sejahtera di desa (Kecamatan)	11				-		-		

	Program Penataan Wilayah Desa	Persentase Desa yang baik penataan wilayah desanya (%)	80						-			
	Fasilitasi Pemekaran Desa	Jumlah Perda yang dibuat terkait Pemekaran Desa (Perda)	3	1	1 + 1	1			-	1	3	1
	Pendampingan Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang memiliki profil desa yang lengkap dan bisa diakses (Desa)	248	124	124	124	100				248	
	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi (Desa)	4	1	1	1	100			1	3	0
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan tepat waktu (%)	100						-		-	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa	umlah Desa yang tepat waktu dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDDesa (Desa)	124	124	124	124	100			124	372	0
	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun (Pedoman)	17	3		3	-				6	

Pendampingan Perdes tentang Pendapatan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Perdes tentang Pendapatan Desa (Desa)	124	104		104	-		208		
Pendampingan Penataan dan Pemanfaatan Aset Desa	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pendampingan terkait Aset Desa (Desa)	124	124		124	-	124	372	0	
Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)	124	124		124	-		248		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan DPMD Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2016-2021. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut : (Tabel 2.2)

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMD KAB. LUWU TIMUR

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14
1	Cakupan Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	-	-	75	80	83	85	-	-	99,57	98,35	83	85	
2	Cakupan Lembaga Ekonomi yang Sehat (%)	-	-	60	75	75	80	-	-	99	88,7	75	80	
3	Persentase Desa Berkembang	-	-	50	60	70	80	-	-	-	82,25	70	80	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam mewujudkan target kinerjanya menghadapi beberapa permasalahan antara lain :

1. Kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;
2. Efektifitas fungsi dan kelembagaan pemerintah desa ;
3. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
4. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di DPMD Luwu Timur sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan aparat pemerintah ditingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa;
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil Desa sehingga gambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa;
3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pembangunan cenderung menurun;
4. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan desa (Desa Swadaya, Swakarya dan Desa Swasembada sebagai tolak ukur perkembangan pembangunan desa;
5. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) masih relative sedikit sehingga usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif;
6. Sumber Daya Alam Perdesaan belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal SDA yang dimiliki;
7. Penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relative sedikit;

8. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum tertata baik sesuai arahan Permendagri no. 5 Tahun 2017.
9. Pemilihan Kepala Desa untuk 62 Desa pada tahun 2021 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan terkait.
10. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang seperti pelatihan dikurangi untuk mencegah penularan covid 19.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Luwu Timur, maka dilakukan beberapa hal :

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah desa serta memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan;
2. Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa;
3. Memantapkan peran Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan;
4. Melakukan pemetaan potensi desa melalui sosialisasi tentang pemahaman program teknologi tepat guna serta melaksanakan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
5. Melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa untuk periode 2021 dengan mempersiapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa.
6. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa serta memfasilitasi pemberian bantuan modal kepada Badan Usaha Milik desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2021.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja DPMD Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut : (tabel 2.4)

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100%	813.072.912	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100 %	813.072.912	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diagendakan	1.717 Surat	2.800.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.717 Surat	2.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	36 rekening	51.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	36 rekening	51.600.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang terbayarkan	2 Orang	28.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang terbayarkan	2 Orang	28.000.000	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	32 Unit	14.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	32 Unit	14.000.000	

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	21 Jenis	18.585.537	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	21 Jenis	18.585.537		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	21 Jenis	18.585.537	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis	21.150.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis	21.150.000		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis	21.150.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 Jenis	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 Jenis	2.500.000		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 Jenis	2.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60 Eksemplar	6.180.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60 Eksemplar	6.180.000		Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60 Eksemplar	6.180.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	2 Jenis	15.675.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	2 Jenis	15.675.000		Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	2 Jenis	15.675.000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan	61 Kali	320.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan	61 Kali	320.000.000		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan	61 Kali	320.000.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis yang terbayarkan	17 Orang	204.000.000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis yang terbayarkan	17 Orang	204.000.000		Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis yang terbayarkan	17 Orang	204.000.000	

	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun	4 Dok	48.582.375	Monitoring dan Evaluasi		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun	4 Dok	48.582.375	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan	375 Kali	80.000.000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	375 Kali	80.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi	100%	205.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi	100%	205.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	9 Jenis	120.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	9 Jenis	120.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	30.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	13 Unit	55.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	13 Unit	55.000.000	

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan dan Hari-hari Tertentu	100%	9.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Aparatur yang mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan dan Hari-hari Tertentu	100%	15.500.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Aparatur yang mendapatkan khusus hari tertentu	36 Orang	9.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		Jumlah Aparatur yang mendapatkan khusus hari tertentu	36 Orang	9.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	90%	164.417.625	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	90%	164.417.625	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, workshop, seminar Perundang-Undangan	17 Orang	164.417.625	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, workshop, seminar Perundang-Undangan	17 Orang	164.417.625	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	7.040.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	7.040.000	

	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun	1 Dok	7.040.000		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 Dok	7.040.000	
	Program Perencanaan dan Pengkangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pengkangan yang disusun tepat waktu	100%	10.000.000		Program Perencanaan dan Pengkangan SKPD		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pengkangan yang disusun tepat waktu	100%	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengkangan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengkangan yang disusun	4 Dokumen	10.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengkangan SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengkangan yang disusun	4 Dokumen	10.000.000	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Cakupan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang Dibentuk Dan Difasilitasi	90%	370.000.000		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan		Cakupan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang Dibentuk Dan Difasilitasi	90%	370.000.000	
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdes	Jumlah Pengurus Bumdesa yang mengikuti pelatihan	124 Org	180.000.000		Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdes		Jumlah Pengurus Bumdesa yang mengikuti pelatihan	124 Org	180.000.000	
	Bantuan Modal bagi Bumdes	Jumlah Bumdes Sehat yang diberikan bantuan modal	2 Bumdes	100.000.000		Bantuan Modal bagi Bumdes		Jumlah Bumdes Sehat yang diberikan bantuan modal	2 Bumdes	100.000.000	

	Pendampingan teknis dan akses pemasaran BumDesa	Jumlah Bumdesa yang mendapatkan pendampingan teknis dan akses pemasaran Bumdesa	124 Bumdesa	90.000.000	Pendampingan teknis dan akses pemasaran BumDesa	Jumlah Bumdesa yang mendapatkan pendampingan teknis dan akses pemasaran Bumdesa	124 Bumdesa	90.000.000		Jumlah Bumdesa yang mendapatkan pendampingan teknis dan akses pemasaran Bumdesa	124 Bumdesa	90.000.000	
	Pendampingan P2MP	Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan dan evaluasi	99 Desa	30.000.000	Pendampingan P2MP	Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan dan evaluasi	99 Desa	30.000.000		Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan dan evaluasi	99 Desa	30.000.000	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Desa yang ikut berpartisipasi dalam Peningkatan Pembangunan Desa	100%	805.000.000	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Desa yang ikut berpartisipasi dalam Peningkatan Pembangunan Desa	100%	805.000.000		Persentase Desa yang ikut berpartisipasi dalam Peningkatan Pembangunan Desa	100%	805.000.000	
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan	124 Desa	105.000.000	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan	124 Desa	105.000.000		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan	124 Desa	105.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penguatan Kelembagaan Lokal	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dalam Penyusunan Peraturan Desa	25 Desa	135.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penguatan Kelembagaan Lokal	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dalam Penyusunan Peraturan Desa	25 Desa	135.000.000		Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dalam Penyusunan Peraturan Desa	25 Desa	135.000.000	

	Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas Program Pamsimas	20 Desa	110.000.000	Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas Program Pamsimas	20 Desa	110.000.000		Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas Program Pamsimas	20 Desa	110.000.000	
	Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	124 Lembaga Kemasyarakatan Desa	25.000.000	Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	124 Lembaga Kemasyarakatan Desa	25.000.000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	124 Lembaga Kemasyarakatan Desa	25.000.000	
	Bimbingan Manajemen Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu	Jumlah Posyandu yang Mendapatkan Pembinaan	11 Posyandu	116.000.000	Bimbingan Manajemen Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu	Jumlah Posyandu yang Mendapatkan Pembinaan	11 Posyandu	116.000.000		Jumlah Posyandu yang Mendapatkan Pembinaan	11 Posyandu	116.000.000	
	Pembentukan dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Kecamatan	Jumlah BKD dan BKAD Yang Dibentuk	26 Lembaga	35.000.000	Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Kecamatan	Jumlah BKD dan BKAD Yang Dibentuk	26 Lembaga	35.000.000		Jumlah BKD dan BKAD Yang Dibentuk	26 Lembaga	35.000.000	
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah Pengurus Kelembagaan yang Mengikuti Penguatan Kapasitas	498 Orang	85.000.000	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah Pengurus Kelembagaan yang Mengikuti Penguatan Kapasitas	498 Orang	85.000.000		Jumlah Pengurus Kelembagaan yang Mengikuti Penguatan Kapasitas	498 Orang	85.000.000	

	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	250 Orang	124.000.000	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	250 Orang	124.000.000	
	Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah	Jumlah Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan	2 Kali	30.000.000	Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah	Jumlah Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan	2 Kali	30.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberikan pembinaan	248 Lembaga	40.000.000	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberikan pembinaan	248 Lembaga	40.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50%	1.300.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50%	1.300.000.000	

	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	124 Orang	150.000.000	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	40 Orang	150.000.000	
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	124Orang	200.000.000	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	124Orang	200.000.000	
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	124 Orang	150.000.000	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	124 Orang	150.000.000	

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Tata kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang tata kelola pemerintahan Desa	55 Orang	200.000.000	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Tata kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang tata kelola pemerintahan Desa	55 Orang	200.000.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang bidang perencanaan pembangunan Desa	124 Orang	200.000.000	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang bidang perencanaan pembangunan Desa	124 Orang	200.000.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang bidang Penyusunan Peraturan Desa	124 Orang	200.000.000	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pelatihan dalam Bidang bidang Penyusunan Peraturan Desa	124 Orang	200.000.000

	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok PKK yang Dimonitoring dan Dievaluasi	139 Kelompok	100.000.000	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok PKK yang Dimonitoring dan Dievaluasi	139 Kelompok	100.000.000	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa yang baik Dan tepat waktu	100%	363.840.000	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa yang baik Dan tepat waktu	100%	363.840.000	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Jumlah Desa yang tepat waktu dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDes	124 Desa	80.000.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes		Jumlah Desa yang tepat waktu dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDes	124 Desa	80.000.000	
	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun	3 Pedoman	70.000.000	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun	3 Pedoman	70.000.000	
	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	124 Desa	213.840.000	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Desa yang mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	124 Desa	213.840.000	
	Program Penataan Wilayah Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	80%	385.000.000	Program Penataan Wilayah Desa		Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	80%	385.000.000	

	Pengawasan Batas Desa	Tersedianya Batas Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	124 Desa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	124 Desa	100.000.000		Tersedianya Batas Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	124 Desa	100.000.000	
	Penyelenggaraan Pemekaran Desa	Jumlah Perda yang dibuat terkait Pemekaran Desa	1 Perda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1 Perda	100.000.000		Jumlah Perda yang dibuat terkait Pemekaran Desa	1 Perda	100.000.000	
	Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi	1 Desa	155.000.000	155.000.000	155.000.000	1 Desa	155.000.000		Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi	1 Desa	155.000.000	
	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Seleksi Perangkat Desa	15 Desa	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15 Desa	15.000.000		Jumlah Desa yang melaksanakan Seleksi Perangkat Desa	15 Desa	15.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	320.410.000	320.410.000	320.410.000	100%	320.410.000		Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	320.410.000	

Pendampingan Penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa)	Jumlah Desa yang Menyusun Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa) Tepat Waktu	124 Desa	60.410.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa)		Jumlah Desa yang Menyusun Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa) Tepat Waktu	124 Desa	60.410.000	
Fasilitasi Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Desa (LKPPD dan LKPJ Desa)	Jumlah Desa yang membuat LKPPD dan LKPJ Desa Tepat Waktu	124 Desa	40.000.000	Fasilitasi Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Desa (LKPPD dan LKPJ Desa)		Jumlah Desa yang membuat LKPPD dan LKPJ Desa Tepat Waktu	124 Desa	40.000.000	
Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa yg menyusun RPJM Desa Tepat Waktu	54 Desa	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa		Jumlah Desa yg menyusun RPJM Desa Tepat Waktu	54 Desa	50.000.000	
Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan	4 Kali	60.000.000	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa		Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan	4 Kali	60.000.000	
Penyusunan Regulasi Tentang Desa	Jumlah Peraturan- Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Terkait Tentang Desa	5 Peraturan	110.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan Tentang Desa		Jumlah Peraturan- Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Terkait Tentang Desa	5 Peraturan	110.000.000	

	Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA	Persentase Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	25%	744.585.000	Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA	Persentase Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	25%	744.585.000		Persentase Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	
	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	1 Kali	145.000.000	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	1 Kali	145.000.000		Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	
	Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna yang Mengikuti Lomba	11 Kelompok	90.000.000	Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna yang Mengikuti Lomba	11 Kelompok	90.000.000		Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna yang Mengikuti Lomba	
	Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Jumlah Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang Dikuti	1 Kali	150.000.000	Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Jumlah Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang Dikuti	1 Kali	150.000.000		Jumlah Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang Dikuti	

Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK)	11 Kali	59.585.000	Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK)		11 Kali	59.585.000	11 Kali	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK)		
Peningkatan kapasitas pengurus PosyanteK dan Wartek	Jumlah Pengurus PosyanteK dan Wartek yang ditingkatkan kapasitasnya	270 Org	150.000.000	Peningkatan kapasitas pengurus PosyanteK dan Wartek		270 Org	150.000.000	270 Org	Jumlah Pengurus PosyanteK dan Wartek yang ditingkatkan kapasitasnya		
Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang Dihasilkan	11 Produk	150.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan		11 Produk	150.000.000	11 Produk	Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang Dihasilkan		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan Penyusunan Renja perangkat daerah 2021 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan musrenbang dan forum organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat, pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2021 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dengan tema **“pemantapan kemajuan dan kemandirian daerah dengan didukung oleh situasi kondusif bagi ketertiban umum dan penyelenggaraan demokrasi”**.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia
2. Penguatan Konektivitas
3. . Nilai Tambah Ekonomi
4. Pemanfaatan Ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air
5. Stabilitas Keamanan Nasional

Target pembangunan makro kewilayahan secara nasional pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%
2. Tingkat Pengangguran sebesar 4,8 – 5,1%
3. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,6%
4. Rasio Gini 0,375 – 0,380%
5. Indeks Pembangunan Manusia 72,5%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dan isu strategis Tahun 2021, serta penyelarasan dengan tema RKP 2021 dan RKPD Kabupaten Luwu Timur 2021 maka tema pembangunan

Kabupaten Luwu Timur adalah **Pemantapan kemajuan dan kemandirian daerah dengan didukung oleh situasi kondusif bagi ketertiban umum dan penyelenggaraan demokrasi**. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Kab. Luwu Timur dalam mewujudkan target pembangunan daerah pada tahun 2021 tersebut melaksanakan tujuan dan sasaran yang juga sejalan dengan target Renstra DPMD. Tujuan tersebut antara lain :

1. Mewujudkan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa dalam Pembangunan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Luwu Timur pada tahun 2020 adalah :

1. Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa;
2. Meningkatnya Kualitas Keberdayaan Desa.

Tujuan dan sasaran Renja DPMD Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :
(tabel 3.2)

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMD TAHUN 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja
1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa dalam Pembangunan	Cakupan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa	Cakupan Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85%
				Cakupan Lembaga Ekonomi yang Sehat (%)	80%
				Meningkatnya kualitas keberdayaan desa	80%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

a. Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa.

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan :
 - 1.1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;
 - 1.2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penguatan Kelembagaan Lokal;
 - 1.3. Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
 - 1.4. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - 1.5. Bimbingan Manajemen Terhadap Kader dalam Pelaksanaan Posyandu;
 - 1.6. Pembentukan dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa dalam Kecamatan;
 - 1.7. Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
 - 1.8. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
 - 1.9. Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah;
 - 1.10. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;
2. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan kegiatan;
 - 2.1. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2.2. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan dan Keluarga;
 - 2.3. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga.
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan kegiatan;
 - 3.1. Pelatihan Keterampilan Manajemen BumDes.

- 3.2. Bantuan Modal Bagi Badan Usaha Milik Desa.
- 3.3. Pendampingan Teknis dan Akses Pemasaran BumDesa
- 3.4. Pendampingan P2MP;
- 4. Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA, dengan kegiatan:
 - 4.1. Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional;
 - 4.2. Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
 - 4.3. Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
 - 4.4. Sosialisasi dan Pembentukan POSYANTEK dan WARTEK
 - 4.5. Peningkatan Kapasitas Pengurus POSYANTEK dan W
 - 4.6. Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan.
- b. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Keberdayaan Desa
 - 1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan kegiatan;
 - 1.1. Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - 1.2. Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 1.3. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
 - 1.4. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa.
 - 1.5. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa
 - 1.6. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Penyusunan Peraturan Desa
 - 1.7. Pelatihan Aparatur Desa dalam Bidang Penataan Aset Desa
 - 2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan kegiatan;

- 2.1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 2.2. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2.3. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Program Penataan Wilayah Desa, dengan kegiatan;
 - 3.1. Penegasan Batas Desa;
 - 3.2. Penyelenggaraan Pemekaran Desa;
 - 3.3. Pelaksanaan Lomba Desa;
 - 3.4. Seleksi Perangkat Desa.
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan.
 - 4.1. Pendampingan Penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa);
 - 4.2. Pendampingan Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Desa (LKPPD dan LKPJ Desa);
 - 4.3. Fasilitasi Penyusunan RPJMDes;
 - 4.4. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa;
 - 4.5. Penyusunan Regulasi Tentang Desa.
- I. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan;
 - I.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - I.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - I.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - I.4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - I.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - I.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - I.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - I.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - I.9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - I.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
 - I.11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis;

- 1.12. Monitoring dan Evaluasi;
 - 1.13. Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan;
 - 2.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan;
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan.
 - 4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan kegiatan;
 - 5.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan;
 - 6.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 melaksanakan 14 program dan 58 kegiatan dengan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5,209,127,650,- dengan rincian sebagai berikut : (Tabel 3.3)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0			Non Urusan										
0	0												
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	986,453,000	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terpenuhi		0			0	
0.00.2.13.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten, SKPD	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Diagendakan	1.717 Surat	2,800,000	Pendapatan Daerah		0 Surat	0				

0.00.2.13.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten, SKPD	Jumlah rekening yang terbayarkan	0 Rekening	58,800,000	Pendapatan Daerah		0 Rekening	0
			Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terbayarkan	36 Rekening				0 Rekening	
0.00.2.13.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten, SKPD	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Yang Terbayarkan	2 Orang	28,000,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
			Jumlah Jenis Alat Dan Bahan Pembersih Kantor	0 Jenis				0 Jenis	
0.00.2.13.01.01.07	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten, SKPD	Jumlah Peralatan Kerja Yang Dipelihara	32 Unit	13,000,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
0.00.2.13.01.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten, SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	21 Jenis	18,000,000	Pendapatan Daerah		0 Jenis	0
0.00.2.13.01.01.09	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Tersedia	4 Jenis	17,000,000	Pendapatan Daerah		0 Jenis	0
0.00.2.13.01.01.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten, SKPD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	0 Buah	2,500,000	Pendapatan Daerah		0 Buah	0

				Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	10 Jenis			0 Jenis	
0.00.2.13.01.01.12		Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia	2 Kotak	15,620,000	Pendapatan Daerah	0 Kotak	0
0.00.2.13.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten, SKPD	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	60 Eksemplar	6,180,000	Pendapatan Daerah	0 Eksemplar	0
0.00.2.13.01.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten, SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Yang Dilaksanakan	61 Kali	415,065,000	Pendapatan Daerah	0 Kali	0
0.00.2.13.01.01.19		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Kabupaten, SKPD	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Yang Terbayarkan	11 Orang	234,000,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
0.00.2.13.01.01.21		Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten, SKPD	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Yang Disusun	6 Dokumen	122,160,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
				Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Yang Dilakukan	0 Kali			0 Kali	

0.00.2.13.01.01.22	Kunjungan kerja dalam daerah	Kabupaten, SKPD	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	375 Kali	53,328,000	Pendapatan Daerah	0 Kali	0
0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	774,580,000		0	
0.00.2.13.01.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten, SKPD	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	9 Unit	119,580,000	Pendapatan Daerah	0 Unit	0
			Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	9 Jenis			0 Jenis	
0.00.2.13.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten, SKPD	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 Unit	600,000,000	Pendapatan Daerah	0 Unit	0
0.00.2.13.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten, SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	13 Unit	55,000,000	Pendapatan Daerah	0 Unit	0

0	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan Dan Hari-hari Tertentu	100%	0		0	
0.00.2.13.01.03.05			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kabupaten, SKPD	Jumlah Aparatur Yang Mendapatkan Pakaian Hari-Hari Tertentu	30 Orang	0	Pendapatan Daerah	0 Orang
0	0	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja Dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	100%	21,674,000		0	
0.00.2.13.01.05.01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten, SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Disusun	1 Dokumen	21,674,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen
0	0	6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Disusun Tepat Waktu	100%	10,144,000		0	

0.00.2.13.01.06.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kabupaten, SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Disusun	6 Dokumen	10,144,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
0	0	4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	90%	74,299,000		0	
0.00.2.13.01.04.03				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten, SKPD	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-Undangan	10 Orang	74,299,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
4				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
4	13										
4	13	2		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan		Cakupan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang Dibentuk dan Dikembangkan	90%	48,393,000		0	
02.13.2.13.01.02.02				Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Kabupaten, SKPD, MALILI, WOTU, KALAEANA, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI, TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA	Jumlah Pengurus BUMDesa Yang Mengikuti Pelatihan	124 Orang	0	Pendapatan Daerah	0 Orang	0

02.13.2.13.01.02.08	Bantuan Modal Bagi Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten, SKPD	Jumlah BUMDES Sehat Yang Diberikan Bantuan Modal	3 BUMDES	0	Pendapatan Daerah	0 BUMDES	0
02.13.2.13.01.02.10	pendampingan teknis dan akses pemasaran BUMDESA	Kabupaten, SKPD, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, BURAU, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI, TIMUR, TOMONI	Jumlah BUMDESA Yang Mendapatkan Pendampingan Teknis Dan Akses Pemasaran BUMDESA	124 BUMDESA	48,393,000	Pendapatan Daerah	0 BUMDESA	0
02.13.2.13.01.02.11	pendampingan P2MP	Kabupaten, SKPD	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pendampingan Dan Evaluasi	99 Desa	0	Pendapatan Daerah	0 Desa	0
4	13	3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	333,697,000		0	
02.13.2.13.01.03.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Kabupaten, SKPD, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI, TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU,	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan	124 Desa	0	Pendapatan Daerah	0 Desa	0

		WASUPONDA							
02.13.2.13.01.03.06	Peningkatan Kapasita SDM Dalam Penguatan Kelembagaan Lokal	Kabupaten, SKPD	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Penyusunan Peraturan Desa	25 Desa	0	Pendapatan Daerah	0 Desa	0	
02.13.2.13.01.03.07	Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Kabupaten, SKPD	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Program Pamsimas	20 Desa	20,000,000	Pendapatan Daerah	0 Desa	0	
02.13.2.13.01.03.08	Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kabupaten, SKPD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Berprestasi	124 Lembaga Kemasyar akatan Desa	25,050,000	Pendapatan Daerah	0 Lembaga Kemasyarakatan Desa	0	
02.13.2.13.01.03.09	Bimbingan Manajemen Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu	Kabupaten, SKPD, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI, TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI	Jumlah Posyandu Yang Mendapatkan Pembinaan	11 Posyandu	143,647,000	Pendapatan Daerah	0 Posyandu	0	

02.13.2.13.01.03.10	Pembentukan dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Kecamatan	Kabupaten, SKPD	Jumlah BKD dan BKAD Yang Dibentuk	26 Lembaga	0	Pendapatan Daerah	0 Lembaga	0
02.13.2.13.01.03.11	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	Kabupaten, SKPD	Jumlah Pengurus Kelembagaan Yang Mengikuti Penguatan Kapasitas	498 Orang	0	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
02.13.2.13.01.03.12	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kabupaten, SKPD	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	250 Orang	100,000,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
02.13.2.13.01.03.13	Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah	Kabupaten, SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Yang Dilaksanakan	2 Kali	45,000,000	Pendapatan Daerah	0 Kali	0
02.13.2.13.01.03.15	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Kabupaten, SKPD	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Diberikan Pembinaan	248 Lembaga	0	Pendapatan Daerah	0 Lembaga	0

4	13	4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50%	382,565,000	0	0	0
02.13.2.13.01.04.01			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Kabupaten, SKPD Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	40 Orang	67,320,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
02.13.2.13.01.04.02			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Kabupaten, SKPD Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	124 Orang	0	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
02.13.2.13.01.04.03			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Kabupaten, SKPD Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	124 Orang	0	Pendapatan Daerah	0 Orang	0

02.13.2.13.01.04.05	Pelatihan aparatur desa bidang tata kelola pemerintahan desa	Kabupaten, SKPD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa	55 Orang	0	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
02.13.2.13.01.04.07	Pelatihan aparatur desa bidang perencanaan pembangunan desa	SKPD, MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa	124 Orang	156,448,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
02.13.2.13.01.04.09	Pelatihan aparatur desa bidang penyusunan peraturan desa	Kabupaten, SKPD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Penyusunan Peraturan Desa	124 Orang	0	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
02.13.2.13.01.04.10	Pelatihan aparatur desa bidang penataan aset desa	Kabupaten, SKPD	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam bidang penataan aset desa	124 Orang	158,797,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
4	13	5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif	100%	698,368,300	0	0

02.13.2.13.01.05.02	Pemberdayaan Kelengkapan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten, SKPD	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan	139 Kelompok	337,959,300	Pendapatan Daerah	0 Kelompok	0
02.13.2.13.01.05.03	Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan dan Keluarga	Kabupaten, SKPD	Jumlah Kelompok Kelengkapan Perempuan Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendidikan	139 Kelompok	300,000,000	Pendapatan Daerah	0 Kelompok	0
02.13.2.13.01.05.04	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelengkapan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten, SKPD	Jumlah Kelompok PKK Yang Dimonitoring dan Dievaluasi	139 Kelompok	60,409,000	Pendapatan Daerah	0 Kelompok	0
4	13	15	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%	113,819,800		0	
02.13.2.13.01.15.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Kabupaten, SKPD, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI	Jumlah Desa Yang Tepat Waktu Dalam Menyusun Peraturan Desa Tentang APBDes	124 Desa	113,819,800	Pendapatan Daerah	0 Desa	0

			TIMUR						
02.13.2.13.01.15.02	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Kabupaten, SKPD	Jumlah Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Yang Disusun	3	0	Pendapatan Daerah	0 Pedoman	0	
02.13.2.13.01.15.05	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Kabupaten, SKPD, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, WOTU, KALAENA, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	124 Desa	0	Pendapatan Daerah	0 Desa	0	
4	13	16	Program Penataan Wilayah Desa	80%	1,790,209,075		0		
02.13.2.13.01.16.02	Penyelenggaraan Pemekaran Desa	Kabupaten, SKPD	Persentase Desa yang Tertata Wilayah Desanya	1 Perda	150,000,000	Pendapatan Daerah	0 Perda	0	
02.13.2.13.01.16.04	Pelaksanaan Lomba Desa	Kabupaten, SKPD	Jumlah Perda Yang Dibuat Terkait Pemekaran Desa	1 Perda	130,000,000	Pendapatan Daerah	0 Desa	0	

02.13.2.13.01.16.05				Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Kabupaten, SKPD, MALLI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI, TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA		Jumlah Kepala Desa Yang Terpilih	62 Desa	1,480,209,075	-	0 Desa	0
02.13.2.13.01.16.06				Seleksi Perangkat Desa		Kabupaten, SKPD		Jumlah Desa Yang Melaksanakan Seleksi Perangkat Desa	15 Desa	30,000,000	Pendapatan Daerah	0 Desa	0
4	13	17		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	100%	587,709,000		0	
02.13.2.13.01.17.01				Pendampingan Penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa)		Kabupaten, SKPD, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALLI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI, TIMUR		Jumlah Desa Yang Menyusun Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa) Tepat Waktu	124 Desa	58,834,000	Pendapatan Daerah	0 Desa	0

02.13.2.13.01.17.02	Pendampingan Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Desa (LKPPD dan LKPJ Desa)	Kabupaten, SKPD, BURAU, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI, TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, WOTU, KALAENA, WASUPONDA	Jumlah Desa Yang Membuat LKPPD dan LKPJ Desa Tepat Waktu	124 Desa	28,375,000	Pendapatan Daerah	0 Desa	0
02.13.2.13.01.17.03	Fasilitasi Penyusunan RPJMDesa	Kabupaten, SKPD	Jumlah Desa Yang Menyusun RPJM Desa Tepat Waktu	54 Desa	0	Pendapatan Daerah	0 Desa	0
02.13.2.13.01.17.05	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Kabupaten, SKPD, WASUPONDA, BURAU, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI, TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, WOTU, KALAENA	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilakukan	4 Kali	40,500,000	Pendapatan Daerah	0 Kali	0
02.13.2.13.01.17.06	Penyusunan Regulasi Tentang Desa	Kabupaten, SKPD	Jumlah Peraturan-Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Terkait Tentang Desa	5 Peraturan	460,000,000	Pendapatan Daerah	0 Peraturan	0

4	13	19	Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	25%	251,180,000	0	0	0	
02.13.2.13.01.19.01			Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Kabupaten, SKPD	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Yang Dilikuti	1 Kali	137,880,000	Pendapatan Daerah	0 Kali	0
02.13.2.13.01.19.03			Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna	Kabupaten, SKPD, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI, TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna Yang Mengikuti Lomba	11 Kelompok	113,300,000	Pendapatan Daerah	0 Kelompok	0
02.13.2.13.01.19.04			Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Kabupaten, SKPD	Jumlah Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Yang Dilikuti	1 Kali	0	Pendapatan Daerah	0 Kali	0
			TOTAL			6,073,091,175			0	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) direncanakan melaksanakan 14 program dan 58 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. Rp. 5,209,127,650,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini : (Tabel 4)

TABEL 4
ALOKASI ANGGARAN DPMD 2021

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	986,453,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.717 Surat	2,800,000	Pendapatan Daerah
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening	58,800,000	Pendapatan Daerah
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2 Orang	28,000,000	Pendapatan Daerah
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	32 Unit	13,000,000	Pendapatan Daerah
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21 Jenis	18,000,000	Pendapatan Daerah
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	17,000,000	Pendapatan Daerah
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Jenis	2,500,000	Pendapatan Daerah
8	Penyediaan makanan dan minuman	2 Kotak	15,620,000	Pendapatan Daerah
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Eksemplar	6,180,000	Pendapatan Daerah
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	61 Kali	415,065,000	Pendapatan Daerah
11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	11 Orang	234,000,000	Pendapatan Daerah

12	Monitoring dan Evaluasi	6 Dokumen	122,160,000	Pendapatan Daerah
13	Kunjungan kerja dalam daerah	375 Kali	53,328,000	Pendapatan Daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	774,580,000	
14	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Unit	119,580,000	Pendapatan Daerah
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	600,000,000	Pendapatan Daerah
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13 Unit	55,000,000	Pendapatan Daerah
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	0	
17	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30 Orang	0	Pendapatan Daerah
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	21,674,000	
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	21,674,000	Pendapatan Daerah
V	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100%	10,144,000	
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	6 Dokumen	10,144,000	Pendapatan Daerah
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90%	74,299,000	
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	74,299,000	Pendapatan Daerah
VII	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	90%	48,393,000	
21	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	124 Orang	0	Pendapatan Daerah
22	Bantuan Modal Bagi Badan Usaha Milik Desa	3 BUMDES	0	Pendapatan Daerah
23	pendampingan teknis dan akses pemasaran BUMDESA	124 BUMDESA	48,393,000	Pendapatan Daerah
24	pendampingan P2MP	99 Desa	0	Pendapatan Daerah
VIII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	333,697,000	
25	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	124 Desa	0	Pendapatan Daerah
25	Peningkatan Kapasita SDM Dalam Penguatan Kelembagaan Lokal	25 Desa	0	Pendapatan Daerah
26	Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	20 Desa	20,000,000	Pendapatan Daerah
27	Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa	124 Lembaga Kemasyarakatan Desa	25,050,000	Pendapatan Daerah

28	Bimbingan Manajemen Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu	11 Posyandu	143,647,000	Pendapatan Daerah
29	Pembentukan dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Kecamatan	26 Lembaga	0	Pendapatan Daerah
30	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	498 Orang	0	Pendapatan Daerah
31	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	250 Orang	100,000,000	Pendapatan Daerah
32	Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah	2 Kali	45,000,000	Pendapatan Daerah
33	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	248 Lembaga	0	Pendapatan Daerah
IX	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50%	382,565,000	
34	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	40 Orang	67,320,000	Pendapatan Daerah
35	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	124 Orang	0	Pendapatan Daerah
36	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	124 Orang	0	Pendapatan Daerah
37	Pelatihan aparatur desa bidang tata kelola pemerintahan desa	55 Orang	0	Pendapatan Daerah
38	Pelatihan aparatur desa bidang perencanaan pembangunan desa	124 Orang	156,448,000	Pendapatan Daerah
39	Pelatihan aparatur desa bidang penyusunan peraturan desa	124 Orang	0	Pendapatan Daerah
40	Pelatihan aparatur desa bidang penataan aset desa	124 Orang	158,797,000	Pendapatan Daerah
X	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	100%	698,368,300	
41	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	139 Kelompok	337,959,300	Pendapatan Daerah
42	Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan dan Keluarga	139 Kelompok	300,000,000	Pendapatan Daerah
43	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	139 Kelompok	60,409,000	Pendapatan Daerah
XI	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100%	113,819,800	
44	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	124 Desa	113,819,800	Pendapatan Daerah
45	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	3 Pedoman	0	Pendapatan Daerah
46	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	124 Desa	0	Pendapatan Daerah
XII	Program Penataan Wilayah Desa	80%	1,790,209,075	
47	Penyelenggaraan Pemekaran Desa	1 Perda	150,000,000	Pendapatan Daerah
48	Pelaksanaan Lomba Desa	1 Desa	130,000,000	Pendapatan

				Daerah
	Pemilihan Kepala Desa	62 Desa	1,480,209,075	
49	Seleksi Perangkat Desa	15 Desa	30,000,000	Pendapatan Daerah
XIII	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	587,709,000	
50	Pendampingan Penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa)	124 Desa	58,834,000	Pendapatan Daerah
51	Pendampingan Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Desa (LKPPD dan LKPJ Desa)	124 Desa	28,375,000	Pendapatan Daerah
52	Fasilitasi Penyusunan RPJMDesa	54 Desa	0	Pendapatan Daerah
53	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	4 Kali	40,500,000	Pendapatan Daerah
54	Penyusunan Regulasi Tentang Desa	5 Peraturan	460,000,000	Pendapatan Daerah
XIV	Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA	25%	251,180,000	
55	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	1 Kali	137,880,000	Pendapatan Daerah
56	Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna	11 Kelompok	113,300,000	Pendapatan Daerah
57	Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	1 Kali	0	Pendapatan Daerah
			6,073,091,175	

BAB V PENUTUP

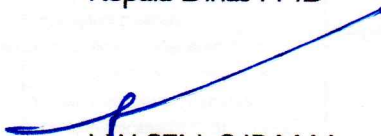
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 telah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021. Dimana Renja Tahun 2021 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keberhasilan yang sudah tertuang dalam renja ini tidak terlepas dari sinergitas, kerjasama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat. Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin

Malili, Juli 2020
Kepala Dinas PMD



HALSEN, S.I.P, M.M

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19720424 199203 1 004

PEMETAAN PERMENDAGRI 90
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERMENDAGRI 13	PERMENDAGRI 90	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RENSTRA
1	2	3	4
Non Urusan			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terpenuhi	
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Diadministrasikan	4,512,495.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	48,930,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	63,000,000.00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	17,080,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70,220,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	30,000,000.00
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantordan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	182,474,918.00
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	11,550,000.00
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatanlainnya yang diadakann	79,939,350.00
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	200,000,000.00
	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang disediakan	7,750,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	2,540,000.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3,024,106.00
	Penyediaan bahan Logistik	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	8,415,250.00
Penyediaan makanan dan minuman	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	8,535,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	6,120,000.00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kunjungan kerja dalam daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	405,880,800.00
	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	2,571,521,604.00
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteranSKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yg disusun tepat waktu	53,434,258.00

PERMENDAGRI 13	PERMENDAGRI 90	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RENSTRA
1	2	3	4
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
	Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan milik daerah yang disusun tepat waktu	8,526,357.00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	
Monitoring dan Evaluasi			23,495,225.00
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	57,674,014.00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	9,538,912.00
	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	7,862,428.00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	28,900,000.00
	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	4,046,755.00
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	34,800,000.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	21,020,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	26,070,000.00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	
	kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota		
Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Fasilitasi Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat Desa/kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Program Pamsimas	147,966,034.00
Bimbingan Manajemen Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu			
Evaluasi kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa			

PERMENDAGRI 13	PERMENDAGRI 90	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RENSTRA
1	2	3	4
Pelatihan keterampilan manajemen BUMdesa	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa		77,315,545.00
Pendampingan teknis dan akses pemasaran BUMDesa			
Pendampingan P2MP			
Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna		236,185,545.00
Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna			
Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan dan Keluarga	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga		700,675,848.00
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga			
Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga			
	Program Administrasi Pemerintahan Desa		
	Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		
Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	134,435,309.00
Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah		Jumlah Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Yang Dilaksanakan	
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	276,121,068.00
Pelatihan aparatur desa bidang perencanaan pembangunan desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa	
Pelatihan aparatur desa bidang penataan aset desa		Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam bidang penataan aset desa	
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	Jumlah Desa Yang Tepat Waktu Dalam Menyusun Peraturan Desa Tentang APBDesa	73,193,664.00
Pelaksanaan Lomba Desa	Fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi	75,487,643.00
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Kepala Desa Yang Terpilih	4,162,903,246.00

PERMENDAGRI 13	PERMENDAGRI 90	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RENSTRA
1	2	3	4
Seleksi Perangkat Desa	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Seleksi Perangkat Desa	41,992,038.00
Pendampingan Penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa)	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Desa Yang Menyusun Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa) Tepat Waktu	42,257,355.00
Pendampingan Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Desa (LKPPD dan LKPJ Desa)	evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Desa Yang Membuat LKPPD dan LKPJ Desa Tepat Waktu	22,708,661.00
Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi pemerintahan desa	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilakukan	25,145,276.00
Penyusunan Regulasi Tentang Desa	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah Peraturan-Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Terkait Tentang Desa	357,295,050.00
Program Penataan Wilayah Desa	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata Wilayah Desanya	
	Kegiatan penyelenggaraan penataan desa		
Penyelenggaraan Pemekaran desa	Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Jumlah Perda Yang Dibuat Terkait Pemekaran Desa	139,379,360.00

BERITA ACARA HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belasbulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Rapat Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : MAHYUDDIN, ST, MM.
NIP : 19761008 200312 1 004
Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Alamat : Bapelitbangda, Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Bapelitbangda, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama : ERWIN, ST
NIP : 19721205 200312 1003
Jabatan : Sekretaris Dinas
Alamat : Malili

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sesuai dengan pencermatan terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah dan format pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, sebagaimana hal tersebut telah disampaikan oleh Pihak Kedua dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini, kedua belah pihak selanjutnya bersepakat terhadap hal-hal sebagai berikut :

- KESATU : Sistematisa penulisan Renja agar disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 129 dan bagian C.5 Penyajian dokumen Renja Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, paling sedikit memuat :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematisa Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Melampirkan juga Program Kegiatan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (lampiran)

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

KEDUA : Untuk Bab II terkait Analisis Kinerja untuk melengkapi semua capaian data baik IKU dan IKK maupun data Indikator yang ada pada Permendagri 86 Tahun 2017.

KETIGA : Melakukan penyempurnaan rancangan Renja Akhir Tahun 2021 berdasarkan hasil Evaluasi meliputi :

1. Penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim Evaluasi sebagaimana tersebut pada formulir Evaluasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
2. Penyempurnaan matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 melalui E-Planning.
3. Melakukan penyesuaian pagu dengan memprioritaskan kegiatan yang mendukung Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021,

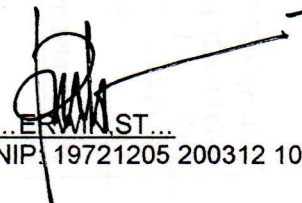
KEEMPAT : Menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur paling lambat cq. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia paling lambat Hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator Tim Evaluasi
Bapelitbangda Kab. Luwu Timur

Tim Penyusun Renja OPD
Kabupaten Luwu Timur




...ERWIN ST...
NIP. 19721205 200312 1003

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL EVALUASIRANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021**

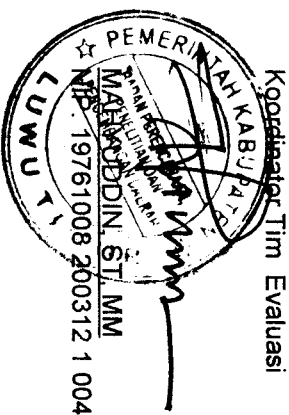
No.	Aspek Pemeriksaan	Penjelasan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Perbaikan
1.	Format E.70	-	- Dicek list sesuai tahapan yang telah dilakukan ketersediaan dokumen (lengkapi SK Tim kerja danPenyusunan Agenda Kerja) - Tahapan penyusunan Renja : Rancangan awal (1-6), rancangan (7-10), rancangan akhir (10.a-13), Penetapan (4) - Sistematika telah menyesuaikan Permendagri 86/2017 (C.5 Penyajian dokumen Renja. Hal 399-407)
2.	Penyajian Daftar Isi	-	
3.	Keterkaitan antar BAB Permendagri 86/2017		
	BAB I PENDAHULUAN		
	1.1 Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	- Telah memuat pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
	1.2 Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	1. No. a hapus 2. No. b Sesuai 3. No. c-d hapus 4. No. e Sesuai 5. No. f-i hapus 6. No. j-k Sesuai 7. No. l hapus 8. No. m-n Sesuai 9. No. o Periksa ulang (Peraturan Bupati)
	1.3 Maksud dan Tujuan	-	- Telah menjelaskan Maksud dan Tujuan terhadap penyusunan dokumen
	1.4 Sistematika	-	- Sudah Sesuai dengan sistematika Permendagri 86/2017
	Penulisan		
	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD		
	TAHUN LALU		

2.1	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD	Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)	- Evaluasi Pelaksanaan Renja PD menyesuaikan petunjuk Tabel T-C.29, dimana tahun n = 2021, tahun n-2= 2019, tahun n-1= 2020 (sampai dengan tiwulan I) - Periksa ulang data kinerjanya
2.2	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.	- Penyajian tabel disesuaikan dengan tabel T-C.30, Liat di Bab. VII Renstra - Sesuaikan dengan data di Bab 2 RKPD tahun 2021 (data IKK)
2.3	2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	Berisikan uraian mengenai: - Sejahter mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; - Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; - Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah; - Tantangan dan peluang; - Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	- Tambahkan isu-isu penting seperti isu Covid-19, pengawalan dana desa, pemilihan kepala desa, dsb sesuai kewenangan Perangkat Daerah sehingga menjadi rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
2.4	2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	Membandingkan rancangan awal Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan	- Telah Konsisten menggunakan Tabel T-C.31 - Periksa kesesuaian di Renstra dan RKPD Tahun 2021 (lihat e-planning)
2.5	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	tidak ada daftar E-Musrenbang dan E-pokir	- Sesuai - Tambahkan model Tabel T-C.32 (isi tidak ada usulan)
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
3.1	3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	- Sesuaikan dengan RKP 2021 - Lihat RKPD 2021 Bab. IV (sesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah)

			- Lihat kebijakan nasional (Kementerian/Lembaga) terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
	3.2 tujuan dan sasaran renja PD	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	- Sesuai
	3.3 program dan kegiatan	Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	- Penyajian tabel sudah sesuai T-C.33 - Sesuai dengan hasil asistensi
	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Mengambarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah	- Lampirkan Program Kegiatan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodeifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
	BAB V. PENUTUP	Berisikan uraian penutup, berupa: - Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. - Kaidah-kaidah pelaksanaan. - Rencana tindak lanjut.	- Rancangan akhir yang telah disempurnakan diserahkan ke kembali Bapelbangda, selanjutnya akan ditetapkan dengan perkada.

Malili, 15 Juni 2020

Koordinator Tim Evaluasi



FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR 2021

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan penyusunan agenda kerja	√			
2	Pengelolaan data dan Informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kab/kota tahun lalu berdasarkan Renja SKPD Kab/Kota	√			
5	Pemantauan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kab/kota	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kab/kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat		√	Tidak ada usulan masyarakat terkait kinerja DPMD	Jika ada usulan masyarakat terkait perbaikan kinerja DPMD maka akan ditelaah dan dipertimbangkan
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum SKPD kab/Kota		√	Forum SKPD belum pernah dilaksanakan tingkat kabupaten tapi dilaksanakan di tingkat provinsi	
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kab/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrembang kecamatan		√	Tidak ada usulan masyarakat terkait kinerja DPMD	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kab/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD	√			
10.c	Mengsinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kab/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing2 SKPD kab/kota sesuai dengan surat edaran bupati	√			

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
1	2	3	4	5	6
11	Sasaran program dan kegiatan SKPD kab/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar SKPD kab/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam form SKPD Kab/Kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing2 kab/kota telah menyusun dan memperkirakan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja SKPD kab/kota yang telah di sahkan	√			

